S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 92/Permentan/OT.140/12/2011

TENTANG

PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1185/Kpts/OT.140/3/2010 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010- 2014;

b. bahwa dalam rangka menyempurnakan kelengkapan dan informasi indikator kinerja diperlukan pengukuran indikator kinerja;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/ RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1185/Kpts/ OT.140/3/2010 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010- 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana kerja, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta audit kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2010- 2014.

Pasal 3

Pimpinan Eselon I wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 4

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian wajib melakukan:

a. meninjau kembali (*review*) atas laporan capaian kinerja setiap unit kerja Eselon I; dan
b. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk menyusun rencana kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit kinerja dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 92/Permentan/OT.140/12/2011
TANGGAL : 27 Desember 2011

PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010-2014

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan era reformasi telah mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan kinerja baik dalam hal pelayananan kepada publik, maupun pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, salah satu amanat yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 / 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang 17/2003 telah mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan : (1) anggaran terpadu/ *unified budget*; (2) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)/ *Medium Term Expenditure Framework*; dan (3) Penganggaran Berbasis Kinerja/ *Perfomance Based Budgeting*. Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun dokumen anggaran yang disebut "Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)".

Pendekatan penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling rnendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Penerapan penganggaran terpadu (*unified budget*) diharapkan dapat mewujudkan: (1) satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya; (2) alokasi dana untuk kegiatan dasar/ operasional organisasi mendukung kegiatan penunjang dan prioritas; dan (3) akun standar (dahulu dikenal sebagai Mata Anggaran Keluaran) untuk satu jenis belanja tidak terduplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Pertimbangan implikasi biaya pada tahun anggaran berikutnya dinyatakan sebagai prakiraan maju. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar disiplin fiskal bisa berjalan secara berkelanjutan karena ketika Kementerian/Lembaga mengajukan usulan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang direncanakan sebagai *based line*, harus menyampaikan pula prakiraan maju untuk tahun-tahun berikutnya.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian *output* dan *outcome* tersebut. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 Kementerian Negara/Lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja/ *performance indicator* dan sasaran/ *target* merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berbasis kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara *output* dengan *outcome* yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian yang menjadi percontohan dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran perlu melaksanakan amanat UU 17/2003 secara komprehensif, diantaranya dengan melengkapi perangkat-perangkat dalam penganggaran berbasis kinerja, diantaranya mencakup : (1) penjabaran peta kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai penyempurnaan PP 38/2007 juncto PP 25 /2000; (2) penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pertanian; (3) penjabaran tupoksi ke dalam Rencana Kerja beserta indikator kinerja dan pengukurannya; dan (4) penetapan Standar Biaya Keluaran (SBK) biaya bidang pertanian. Terkait dengan persyaratan nomor (3) tersebut, hingga saat ini belum ada standar baku pengukuran indikator kinerja Kementerian Pertanian yang menjadi pedoman dalam standardisasi penentuan dan pengukuran indikator kinerja Kementan. Padahal keberadaan standar baku pengukuran indikator kinerja merupakan elemen yang sangat penting dalam pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja yang terstandardisasi akan mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang *relevant* dan *reliable* sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan adanya standar baku pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat efektivitas dan efisiensi pencapaian *output* dan *outcome* yang dihasilkan suatu kegiatan/program. Untuk itulah buku ini disusun sebagai Standar Baku Pengukuran Indikator Kinerja yang akan digunakan oleh seluruh unit Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan program/ kegiatan berbasis kinerja guna mewujudkan prinsip-prinsip anggaran terpadu, berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Manfaat Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja meliputi:

1. mempermudah perencana di pusat dan daerah dalam menyusun rencana program/ kegiatan dan rancangan *outcome / output* -nya;
2. mempermudah pelaksana dalam melaksanakan program/ kegiatan;
3. mempermudah evaluator dalam memonitor dan mengevaluasi/ mengukur kinerja; dan
4. mempermudah auditor dalam melakukan audit kinerja.

C. Output yang Diharapkan

Output yang diharapkan adalah Buku Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang memuat tabulasi standardisasi pengukuran indikator kinerja unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

D. Pengertian dan Definisi

1. Penganggaran Berbasis Kinerja: penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
2. Kinerja Instansi Pemerintah: gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Pengukuran Kinerja: kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Indikator Kinerja: ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai (*ex-post*). Indikator kinerja juga digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan/sasaran telah ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*): adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Masukan (*input*): jumlah sumberdaya seperti dana, SDM, peralatan, material dan masukan lain; yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam program. Dengan meninjau distribusi sumberdaya yang dimiliki, akan diketahui apakah input telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

7. Indikator Keluaran (*output*): barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program dan kebijakan.
8. Indikator Hasil (*outcome*): segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan dalam suatu program.
9. Indikator Manfaat (*benefit*): gambaran manfaat yang diperoleh secara langsung dari indikator *outcome*. Manfaat baru nampak setelah beberapa waktu kemudian, dan bisa dicapai bila *output* dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat, waktu, dan tepat sasaran).
10. Indikator Dampak (*impact*): pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, dan baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

II. METODOLOGI

A. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data terkait dengan indikator kinerja ini dilakukan melalui studi literatur dan diskusi intensif dengan para pejabat dan petugas yang terkait dari masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

B. Metode Penyusunan

Penyusunan pedoman pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan melengkapi informasi indikator kinerja yang sekurang-kurangnya terdiri dari 13 informasi, mencakup:

1. Nama Indikator: mengidentifikasi nama dan kategori indikator (indikator output/outcome, jika merupakan indikator *mainstreaming* diberi tanda);
2. Tujuan / Kepentingan: menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indikator dan mengapa indikator itu penting;
3. Metode Penghitungan: menggambarkan cara penghitungan indikator (jika indikator yang digunakan merupakan hasil perhitungan dari dasar informasi yang dikumpulkan);
4. Tipe Penghitungan: merupakan indikator kinerja yang bersifat kumulatif atau non-kumulatif;

5. Indikator Baru: mengidentifikasi indikator baru atau indikator lama yang berubah sasaran kinerjanya dibanding tahun sebelumnya;
6. Kinerja yang Diharapkan: mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan;
7. Standar Indikator: mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima (*benchmark*);
8. Penanggungjawab Indikator: mengidentifikasi tanggung jawab secara organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indikator;
9. Pengelola Data Indikator: mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pengumpulan dan penyediaan data indikator sesuai jadwal;
10. Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Data Indikator: tanggal/bulan yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indikator;
11. Jadwal Pelaporan: mengidentifikasi apakah indikator dilaporkan per tiga bulan, per semester atau per tahun;
12. Sumber/ Pengumpulan Data: menggambarkan darimana informasi didapat dan bagaimana pengumpulannya; dan
13. Hambatan Pengumpulan Data: mengidentifikasi hambatan pengumpulan data atau informasi, terkait dengan pengukuran kinerja.

III. PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010-2014

Kementerian Pertanian pada tahun 2010-2014 melaksanakan 12 program pembangunan pertanian. Masing-masing program pembangunan pertanian tersebut mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari 12 unit Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya program pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh unit Eselon-I dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi unit Eselon-II yang berada di bawahnya.

Ukuran keberhasilan Eselon-I dalam menjalankan program diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Sebagaimana diketahui bahwa *outcome* merupakan hasil dari berfungsinya *output* yang telah dilaksanakan oleh unit kerja Eselon-II. Penjabaran program ke dalam kegiatan serta jumlah indikator keberhasilannya disajikan pada tabel 1, sedangkan standar baku pengukuran indikator kinerja Kementan seperti format 1 sampai dengan 13.

Tabel Program dan Kegiatan serta Jumlah Indikator Kementan 2010-2014

No.	Program/Kegiatan		Jumlah Indikator Outcome	Jumlah Indikator Output
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian		4	33
	1.1	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian	-	4
	1.2	Peningaktan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian	-	4
	1.3	Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi public	-	6
	1.4	Pengelolaan keuangan, perlengkapan dan kearsipan Kementerian Pertanian	-	4
	1.5	Penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang pertanian	-	5
	1.6	Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan petaniadalam kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral	-	2
	1.7	Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian	-	5

No.	Program/Kegiatan		Jumlah Indikator Outcome	Jumlah Indikator Output
	1.8	Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	-	3
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian		1	11
	2.1	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada SATKER (Setjen, Ditjen, Badan)	-	4
	2.2	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan lingkup SATKER Setjen, Ditjen Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengebangan SDM Pertanian	-	1
	2.3	Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan tujuan tertentu pada SATKER lingkup Kementan	-	2
	2.4	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	-	4
3.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan		2	12
	3.1	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	-	1
	3.2	Pengelolaan produksi tanaman serealia	-	1
	3.3	Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi	-	1
	3.4	Pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan	-	1
	3.5	Pengelolaan penyediaan benih tanaman pangan	-	1
	3.6	Penanganan pasca panen tanaman pangan	-	1
	3.7	Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI	-	1
	3.8	Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan system mutu laboratorium pengujian benih	-	3
	3.9	Pengembangan peramalan serangan organism pengganggu tumbuhan	-	2
4.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan		3	24
	4.1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan	-	3
	4.2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan	-	3
	4.3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan	-	4

No.	Program/Kegiatan		Jumlah Indikator Outcome	Jumlah Indikator Output
	4.4	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	-	5
	4.5	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	-	5
	4.6	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	-	4
5.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan		30	28
	5.1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	-	5
	5.2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	-	7
	5.3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	-	4
	5.4	Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan	-	1
	5.5	Dukungan Penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan	-	3
	5.6	Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi	-	7
	5.7	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan	-	1
6.	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal		6	16
	6.1	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal	-	4
	6.2	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	-	2
	6.3	Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	-	4
	6.4	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	-	3
	6.5	Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan	-	2
	6.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	-	1
7.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian		4	24

No.	Program/Kegiatan		Jumlah Indikator Outcome	Jumlah Indikator Output
	7.1	Pengembangan Mutu dan Standardisasi	-	6
	7.2	Pengembangan Pemasaran Domestik	-	4
	7.3	Pengembangan Pemasaran Internasional	-	4
	7.4	Pengembangan Usaha dan Investasi	-	3
	7.5	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	-	4
	7.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	-	3
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		1	23
	8.1	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	-	4
	8.2	Pengelolaan air irigasi pertanian	-	4
	8.3	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	-	8
	8.4	Fasilitas kredit program	-	1
	8.5	Pengelolaan sistem fasilitasi pupuk dan pestisida	-	5
	8.6	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian	-	1
9.	Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing		4	41
	9.1	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	-	6
	9.2	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	-	3
	9.3	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura	-	8
	9.4	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	-	5
	9.5	Penelitian dan Pengembangan Peternakan dan Veteriner	-	4
	9.6	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	-	1
	9.7	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian	-	3
	9.8	Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	-	2
	9.9	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	-	3

No.	Program/Kegiatan		Jumlah Indikator Outcome	Jumlah Indikator Output
	9.10	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	-	2
	9.11	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	-	2
	9.12	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknolgi Pertanian	-	2
10.	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani		4	23
	10.1	Revitalisasi Pendidikan Pertanian Serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi	-	6
	10.2	Pendidikan Menengah Pertanian	-	3
	10.3	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	-	6
	10.4	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	-	8
11.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		4	27
	11.1	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	-	5
	11.2	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	-	5
	11.3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	-	7
	11.4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	-	10
12.	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati		3	19
	12.1	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	-	1
	12.2	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	-	1
	12.3	Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan	-	3
	12.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Kemanan	-	5
	12.5	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina	-	3

No.	Program/Kegiatan		Jumlah Indikator Outcome	Jumlah Indikator Output
	12.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	-	6

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO